

Mendorong Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan pada Desa Salenrang di Kabupaten Maros

**Rasyidah Nadir¹, Tawakkal², Kartini³, Uyung Tauzia⁴, Sry Rezky⁵, Mayang Sari⁶,
Khamila Al Iqlima⁷**

*Correspondence email: rasyidah_nadir@yahoo.co.id

UIN Alauddin Makassar

(Submitted: 20-07-2025, Revised: 24-07-2025, Accepted: 24-07-2025)

ABSTRAK: Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat desa pada desa Salenrang kecamatan Bontoa kabupaten Maros. PTPKD dan perangkat desa dalam program ini merupakan mitra yang secara administrasi menyelenggarakan pengelolaan dana desa. Tuntutan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dana desa menjadi suatu hal penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa Salenrang. Kegiatan Program dilakukan meliputi kajian literatur empiris alokasi APBDesa untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan desa Salenrang kecamatan Bontoa kabupaten Maros dalam tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024. Kegiatan ini telah mampu membantu permasalahan mitra dalam hal pengelolaan dana desa secara optimal untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan desa Salenrang.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Kesejahteraan, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT: The Village Partner Development Program (PPDM) aims to provide knowledge and understanding to the Technical Implementers of Village Financial Management (PTPKD) and village officials in Salenrang Village, Bontoa District, Maros Regency. PTPKD and village officials in this program are partners who administratively manage village funds. The demand for accountability and responsibility for village funds is an important thing that must be met by the Salenrang Village government. Program activities carried out include an empirical literature review of the Village Budget allocation for the welfare and sustainable development of Salenrang Village, Bontoa District, Maros Regency in the 2022 to 2024 fiscal years. This activity has been able to help partners' problems in terms of optimal village fund management for sustainable development and the welfare of Salenrang Village.

Keywords: Village Fund Management, Accountability, Welfare, Sustainable Development.

I. PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melayani masyarakat desa dibentuk suatu pemerintahan desa yang menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa

Undang-Undang tentang desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diantaranya meliputi penyusunan rancangan APBDesa, penetapan APBDesa, pelaksanaan APBDesa, perubahan APBDesa, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 adalah Menopang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2025 berdasarkan infografis yang tersedia adalah: (1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Salah satu prioritas utama adalah alokasi maksimal sebesar 15% dari total Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin ekstrem yang masih membutuhkan bantuan ekonomi, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat desa. (2) Ketahanan Pangan. Dana Desa juga dialokasikan paling rendah sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan di desa. Program ini meliputi kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan lokal, pengolahan hasil pertanian,

dan pendistribusian bahan pangan yang mendukung kemandirian desa. (3) Dana Operasional Pemerintah Desa. Sebanyak 3% dari total Dana Desa dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa. Alokasi ini mencakup kegiatan administratif dan operasional lainnya yang menunjang pelayanan publik serta pengelolaan desa yang efektif dan efisien. Dan (4) Pengembangan Potensi Desa dan Program Prioritas Lainnya.

Dana Desa juga digunakan untuk mendukung berbagai program berupa: (1) Peningkatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Dana digunakan untuk memperkuat desa dalam menghadapi perubahan iklim, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengendalian bencana. (2) Promosi dan Layanan Kesehatan Dasar di Desa. Fokus pada penurunan angka stunting serta peningkatan akses layanan kesehatan untuk masyarakat desa.. (3) Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai. Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur desa yang memanfaatkan bahan baku lokal. (5) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Desa Digital. Percepatan implementasi teknologi digital di desa diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung UMKM, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Dan (5) Sektor Prioritas Lainnya. Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendanai sektor-sektor prioritas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pengelolaan lingkungan.

Dengan adanya prioritas ini, diharapkan Dana Desa 2025 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun desa yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kemandirian desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar Dana Desa tepat sasaran dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat desa.

Desa Salenrang sebagai salah satu wilayah pemerintahan, Sebelum kemerdekaan, tepatnya pada zaman perjuangan kemerdekaan telah tumbuh beberapa kerajaan kecil di Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, khususnya kerajaan-kerajaan kecil yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Gowa. Termasuk di dalamnya “Kerajaan Salenrang” yang bergelar “Dampang Salenrang”. Dalam sejarah wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa hanya dikenal dua Dampang, masing-masing “Dampang Ko’mara di Gowa dan Dampang Salenrang di Salenrang. Dampang Salenranglah yang mewakili Salenrang (wilayah Maros sekarang) dan sekitarnya setiap kali ada sidang pada masa Kerajaan di Gowa dahulu Adapun luas wilayah kekuasaan Dampang Salenrang pada saat itu adalah meliputi luas wilayah kabupaten Maros sekarang, bahkan termasuk sebagian Makassar sekarang. Sebagaimana dikiaskan dalam ungkapan bahwa batas kekuasaan Dampang Salenrang adalah: “Male’leng panaonna, Butta tattiri’ka panrai’na, Batu Ma’lipunga panai’na, tallangbatangan passulu’na”, yang artinya batas wilayah kekuasaan Dampang Salenrang adalah “ Batas ke bawahnya (Utara) adalah wilayah Male’leng; batas

sebelah timur adalah tanah (daerah) dimana air mengalir ke barat (Camba-Mallawa); batas ke atas (selatan) adalah batu ma'lipunga (wilayah batas Gowa sekarang); dan Batas keluarnya (baratnya) adalah sampai batas dimana pandangan tenggelam (batas Pandangan) ke laut..”

Desa Salenrang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah 9,60 km² dan terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Desa Salenrang dengan berbagai potensi sumber daya alam terkenal dengan Desa Wisata dan lumbung Pangan, dalam visi tersebut salenrang diharapkan selambat-lambatnya lima tahun yang akan datang desa Salenrang menjadi salah satu tujuan wisata domestik dan local sekaligus sebagai desa lumbung pangan. Tentunya dengan visi tersebut diharapkan desa Salenrang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan potensi pendapatan dari sektor pariwisata dan sektor pertanian. Pendapatan desa Salenrang dalam kurun waktu terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022, pendapatan desa tercatat sebesar Rp2.517.205.000. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp2.075.295.000. Selanjutnya, pada tahun 2024 pendapatan desa kembali mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp2.613.110.330.

Sementara disisi pengeluaran desa Salenrang berupa belanja desa dan pembiayaan desa dalam kurun waktu tiga tahun cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022, belanja desa tercatat sebesar Rp2.667.207.634 dan pembiayaan desa tercatat sebesar Rp65.578.685. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan belanja desa yang cukup signifikan menjadi Rp2.140.873.685 dan pembiayaan desa masih sama di tahun 2022 tercatat sebesar Rp65.578.685. Selanjutnya, pada tahun 2024 belanja desa kembali mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp2.650.606.147 dan pembiayaan desa mengalami penurunan tercatat sebesar Rp37.495.817.

Namun demikian, pengelolaan dana desa menentukan apakah benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan perekonomian desa. Oleh sebab itu diperlukan kajian untuk melihat bagaimana pengelolaan dana desa di desa Salenrang dilakukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa Salenrang secara umum terdiri dari beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: Membangun prasarana dan sarana wisata yang merupakan salah satu potensi utama sumber pendapatan desa Salenrang menuju Desa Wisata; Intensifikasi lahan pertanian dan perikanan dengan peningkatan pembangunan; prasarana dan sarana penunjang dalam mewujudkan desa lumbung pangan; Pembangunan Pasar desa dan TPI sebagai sarana pemasaran hasil produksi dan; perputaran uang dalam perekonomian menuju masyarakat desa yang sejahtera; Mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme Usaha Ekonomi Produktif, Lembaga keuangan Desa dan BUMDes dalam membangun kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat desa; Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan produk desa dalam setiap kegiatan pembangunan; Meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai sumber pendapatan dalam rangka membangun kemandirian desa; Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan; dan pengembangan bakat – minat generasi muda dalam menciptakan generasi cerdas yang sehat dan berbakat; Membangun suasana kondusif berdasarkan pendekatan solidaritas dan kesetiakawanan sosial masyarakat desa; Meningkatkan bantuan pembangunan prasarana/sarana ibadah dan kegiatan sosial keagamaan masyarakat desa dalam membangun suasana kota santri.

Berbagai regulasi dan, tentunya masih menjadi kesulitan bagi aparat desa dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan tersebut, termasuk mitra perangkat desa Salenrang.

Program pengembangan desa mitra ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana desa di desa Salenrang dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Salenrang. Program ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pengelolaan dana desa khususnya di desa Salenrang, dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra tersebut, maka kegiatan program pengembangan desa mitra ini akan dilaksanakan kajian literatur untuk Mendorong Pengelolaan Dana Desa menuju Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan pada Desa Salenrang di Kabupaten Maros. Hal ini sebagai bentuk tambahan informasi bagi penggunaan dana desa dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat desa pada desa Salenrang kecamatan Bontoa kabupaten Maros.

II. METODE PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mitra adalah sebagai berikut:

1. Survey awal. Survey awal merupakan tahapan dimulai dengan mendatangi lokasi kegiatan dan menyampaikan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.
2. Pelaksanaan Kajian
3. Literatur dengan mengolah data APBDes
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan program yang meliputi pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan program.

Metode pelaksanaan program IbM ini digambarkan secara sistematis pada flowmap berikut ini.



Dari flowmap di atas dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Melakukan survey awal untuk kesediaan Mitra Perangkat Desa Salenrang.
2. Melakukan kegiatan kajian literatur
3. Membuat laporan akhir atas pertanggungjawaban program yang dilaksanakan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kajian literatur penggunaan dana desa Salenrang. Berikut gambaran kajian literatur penggunaan dana desa dalam tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2024. Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa Salenrang terdiri dari belanja: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah observasi dan wawancara di kantor desa Salenrang.

Observasi dan wawancara dilakukan bersama perangkat desa. Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan anggaran dan realisasi Belanja Dana Desa Salenrang tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	945.057.812	923.601.095	21.456.717	35,4
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	852.700.000	815.700.000	37.000.000	32
Bidang Pembina Kemasyarakatan	114.529.822	114.407.854	121.968	4,3
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	157.320.000	150.320.000	7.000.000	5,9
Bidang penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	597.600.000	597.600.000	-	22,4
Jumlah	2.667.207.634	2.601.628.949	65.578.685	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp2.667.207.634, namun realisasinya hanya sebesar Rp2.601.628.494. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar Rp65.578.685 yang dimasukkan ke dalam penerimaan pembiayaan desa.

Ditinjau dari uraian belanja desa pada bidang penyelenggaraan kegiatan operasional yang mendukung fungsi pemerintahan desa. Anggaran belanja desa mencakup berbagai

bidang yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tujuan pembangunan di tingkat desa. Beberapa uraian anggaran belanja desa antara lain dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp945.057.812 dengan persentase 35,4%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp852.700.000 dengan persentase 32%, bidang pembina kemasyarakatan sebesar Rp114.529.822 dengan persentase 4,3%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp157.320.000 dengan persentase 5,9%, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp597.600.000 dengan persentase 22,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dari lima bidang belanja, bidang penyelenggaraan pemerintah desa memperoleh persentase tertinggi sebesar 35,4% yang mencerminkan pemerintah desa Salenrang lebih banyak mengalokasikan anggaran, tenaga, dan perhatian pada aspek administrasi dan tata kelola pemerintah desa. Akan tetapi aktivitas pada bidang pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan persentase 32% yang berarti tetap mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat desa Salenrang.

Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan anggaran dan realisasi Belanja Dana Desa Salenrang tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	951.051.685	943.304.041	7.747.644	44,4
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	758.442.000	758.442.000	-	35,4
Bidang Pembina Kemasyarakatan	78.780.000	48.780.000	30.000.000	3,7
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000	46.530.000	3.470.000	2,3
Bidang penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	302.600.000	267.600.000	35.000.000	14,1
Jumlah	2.140.873.685	2.064.656.041	76.217.644	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp2.140.873.685, namun realisasinya hanya sebesar Rp2.064.656.041. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar Rp76.217.644 yang dimasukkan ke dalam penerimaan pembiayaan desa.

Ditinjau dari uraian anggaran belanja desa pada bidang penyelenggaraan kegiatan operasional yang mendukung fungsi pemerintahan desa. Anggaran belanja desa mencakup berbagai bidang yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tujuan pembangunan di tingkat desa. Beberapa uraian belanja desa antara lain dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp951.051.685 dengan persentase 44,4%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp758.442.000 dengan persentase 35,4%, bidang pembina kemasyarakatan sebesar Rp78.780.000 dengan persentase 3,7%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp50.000.000 dengan persentase 2,3%, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak

desa sebesar Rp302.600.000 dengan persentase 14,1%. Hal ini menunjukkan bahwa dari lima bidang belanja, bidang penyelenggaraan pemerintah desa memiliki persentase masih tinggi sebesar 44,4% yang mencerminkan pemerintah desa Salenrang masih lebih banyak mengalokasikan anggaran, tenaga, dan perhatian pada aspek administrasi dan tata kelola pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki persentase 35,4% yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Salenrang masih menjadi prioritas utama.

Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan anggaran dan realisasi Belanja Dana Desa Salenrang tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.132.718.147	1.085.788.530	46.929.617	42,7
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.143.345.000	1.143.345.000	-	43,1
Bidang Pembina Kemasyarakatan	69.000.000	69.000.000	-	2,6
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	141.200.000	127.800.000	13.400.000	5,3
Bidang penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	164.343.000	108.000.000	56.343.000	6,2
Jumlah	2.650.606.147	2.533.933.530	116.672.617	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp2.650.606.147, namun realisasinya hanya sebesar Rp2.533.933.530. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar Rp116.672.617 yang dimasukkan ke dalam penerimaan pembiayaan desa. Ditinjau dari uraian belanja desa pada bidang penyelenggaraan kegiatan operasional yang mendukung fungsi pemerintahan desa. Belanja desa mencakup berbagai bidang yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tujuan pembangunan di tingkat desa. Beberapa uraian belanja desa antara lain dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp1.132.718.147 dengan persentase 42,7%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp1.143.345.000 dengan persentase 43,1%, bidang pembina kemasyarakatan sebesar Rp69.000.000 dengan persentase 2,6%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp141.200.000 dengan persentase 5,3%, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp164.343.000 dengan persentase 6,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dari lima bidang belanja, bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki persentase tertinggi sebesar 43,1% yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Salenrang menjadi prioritas utama dalam APBDesa.

Berdasarkan data belanja desa Salenrang selama tiga (3) tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran belanja pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa mengalami kenaikan secara signifikan dilihat dari persentase setiap tahunnya yaitu, tahun 2022 sebesar 32%, tahun 2023 sebesar 35,4% dan tahun 2024 sebesar 43,1%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan prioritas dan kesadaran pemerintah Desa Salenrang

bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Ditinjau dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Salenrang, dapat ditemukan tiga dampak utama yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat desa Salenrang, yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi di mana terdapat peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari naiknya produksi barang dan jasa. Namun, peningkatan pendapatan ini tidak selalu dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini terlihat dari kemajuan di berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan kemudahan terhadap akses jalan desa Salenrang.

2. Membuka lapangan kerja

Pembangunan infrastruktur membutuhkan berbagai sumber daya untuk mengerjakannya. Baik itu sumber daya alam yang menjadi bahan baku atau faktor pendukung pembangunan, maupun sumber daya manusia. Selain keberadaannya sendiri, kebutuhan akan pengolahan sumber daya alam memerlukan keterlibatan tenaga manusia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh desa Salenrang memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hal ini memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga desa, sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat setempat.

3. Pemerataan pembangunan

Kesempatan yang terbuka akibat adanya pembangunan infrastruktur desa Salenrang dapat berdampak kepada sesuatu yang lebih besar, yakni pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah pun dapat menghidupi dirinya sendiri. Terbukanya kesempatan bagian suatu daerah berarti terbukanya kesempatan bagi setiap individu di dalamnya.

Hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- 1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- 2) Peningkatan tingkat kehidupan dan tingkat pendapatan masyarakat setempat;

Pemerataan pembangunan di wilayah Desa Salenrang.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Salenrang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dua pelajaran utama yang dapat dipetik adalah: (1) pengelolaan dana yang terfokus pada pembangunan infrastruktur dasar jalan raya, pembangunan irigasi sawah, dan pengadaan drainase telah berhasil menciptakan dampak positif bagi perekonomian desa, serta (2) mekanisme pengawasan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan transparansi laporan keuangan menjadi faktor penunjang akuntabilitas pengelolaan dana.

Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi: (1) perlunya penyusunan rencana anggaran yang lebih realistis untuk meminimalisir selisih antara anggaran dengan realisasi, serta (2) peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen proyek dan pengelolaan keuangan desa. Dengan implementasi rekomendasi tersebut diharapkan efektivitas penggunaan dana desa dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa Salenrang

V. DAFTAR PUSTAKA

- Beatrice Nahanin, dkk. 2021. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" (online) (<https://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/JAMIN/article/download/359/196/>, diakses 29 Mei 2025)
- Bima Sakti Nusaananta Prayitno, 2020, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal" (online) (<https://repository.radenintan.ac.id/11554/2/SKRIPSI%202.pdf>, diakses 31 Mei 2025)
- Berti Pakaila. 2020. "PENGARUH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KAMPUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SORONG" (online) (<https://ojs.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/download/403/304>, diakses 31 Mei 2025)
- Indonesia. (2014). Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (<https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf>, diakses 30 Mei 2025)
- Indonesia. (2014). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara."

(<https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf>, diakses 30 Mei 2025)

Jefi B. Apena, dkk. 2023. "Dampak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kiama Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud" (online) Vol. 23 No. 4 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/47045>, diakses pada 29 Mei 2025)

Maria Vianey Rae, dkk. (2022). "ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR" (online) (<https://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes/article/download/1861/989/6091>, diakses 31 Mei 2025)

Max Ki. 2024. "Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya (online) (<https://umsu.ac.id/berita/pengertian-pertumbuhan-ekonomi-faktor-ciri-ciri-dan-contohnya/>, diakses 02 Juni 2025

<https://situsari.digitaldesa.id/berita/prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2025>